BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Namun, dalam praktiknya, masih banyak terjadi perkawinan pada usia anak yang berdampak negatif terhadap perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Perkawinan anak sering kali mengakibatkan putus sekolah, tingginya angka kematian ibu dan anak, kekerasan dalam rumah tangga, serta kemiskinan struktural yang berkepanjangan. Perkawinan anak masih menjadi salah satu permasalahan serius yang dihadapi Indonesia. Meskipun telah ada peningkatan kesadaran hukum dan sosial, praktik ini masih marak terjadi, terutama di wilayah pedesaan. Perkawinan anak berdampak buruk terhadap pemenuhan hak-hak anak, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, perlindungan dari kekerasan, dan perkembangan mental yang sehat.³

Diciptakan laki-laki dan perempuan sebagai salah satu bentuk bahwa manusia merupakan makhluk yang berpasang-pasangan. Karena hal inilah diperlukan adanya ikatan yang resmi, sah menurut agama dan sah menurut undang-undang. Ikatan ini disebut perkawinan atau dalam Islam disebut dengan nikah. Nikah berarti suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang lakilaki dan perempuan yang bukan muhrim dan

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1

³ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Panduan Pencegahan Perkawinan Anak, Jakarta: KPPPA, 2022, hlm. 8.

menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Dalam pengertian luas menurut Moh. Rifa'i bahwa pernikahan merupakan suatu ikatan lahir antara dua orang, laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syariat Islam.⁴

Untuk menjawab permasalahan tersebut, Pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya pada Pasal 7 ayat (1) yang menyamakan batas usia minimum perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Perubahan ini merupakan langkah strategis dalam melindungi hak anak dan mencegah praktik perkawinan usia dini, yang sebelumnya masih dibenarkan secara hukum bagi anak perempuan yang telah berusia 16 tahun. Perubahan tersebut menetapkan bahwa batas usia minimum untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah **19 tahun**, sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) dan diperkuat dalam lampiran UU tersebut. Tujuannya adalah untuk mencegah perkawinan anak dan mewujudkan perkawinan yang sehat, sejahtera, dan bertanggung jawab. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat tantangan dalam implementasi di lapangan, termasuk penggunaan celah hukum berupa permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama.⁵

Implementasi dari ketentuan ini tidak hanya sebatas perubahan norma dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus diwujudkan

⁴ Moh. Rifa'i, Ilmu Fiqih Islam Lengkap, (Semarang: CV. Toha Putra, 1978). 453

⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 186.

dalam praktik oleh lembaga-lembaga yang berwenang, seperti Kantor Urusan Agama (KUA), pengadilan agama, serta melalui peran aktif masyarakat dan pemerintah daerah. Namun, dalam pelaksanaannya, masih terdapat berbagai tantangan, termasuk perbedaan interpretasi hukum, budaya lokal, tekanan sosial, serta penggunaan dispensasi nikah yang kerap menjadi celah untuk melegalkan perkawinan anak.

Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi pembatasan usia menikah belum sepenuhnya efektif dalam mencegah perkawinan anak, terutama di wilayah pedesaan atau daerah dengan angka pernikahan dini yang tinggi. Khususnya dalam konteks upaya pencegahan perkawinan anak di tingkat lokal, serta untuk mengetahui hambatan dan strategi yang dapat dioptimalkan ke depan.

Di wilayah Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, kasus perkawinan anak masih dijumpai meskipun regulasi telah diperketat. Berdasarkan data dari Kantor Urusan Agama (KUA) Prambon, masih terdapat permohonan pernikahan yang melibatkan calon mempelai di bawah usia yang dipersyaratkan oleh undang-undang. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan regulasi belum sepenuhnya diiringi dengan perubahan sosial dan pemahaman hukum di masyarakat.

Selain itu, terdapat kecenderungan bahwa masyarakat masih menjadikan pernikahan sebagai solusi atas berbagai persoalan, seperti kehamilan di luar nikah atau tekanan sosial, yang membuat praktik perkawinan anak terus berlangsung. Dalam konteks ini, KUA memiliki peran strategis tidak hanya sebagai pelaksana administrasi pernikahan,

tetapi juga sebagai garda depan dalam mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pernikahan pada usia yang matang.

Oleh karena itu, Berdasarkan uraian tersebut penelitian ini sangatlah penting untuk diteliti serta mengkaji lebih dalam bagaimana **implementasi pembatasan usia menikah berdasarkan Lampiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019** khususnya dalam konteks upaya pencegahan perkawinan anak di tingkat lokal, serta untuk mengetahui hambatan dan strategi yang dapat dioptimalkan ke depan yang dilakukan oleh KUA Prambon/

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian in sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang perkawinan anak yang terjadi di Wilayah Kecamatan Prambon?
2. Bagaimana penerapan Undang-Undng nomor 16 tahun 2019 ttentang batas usia kawin pada Wilayah KUA Kecamatan Prambon?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui dan Memahami Apa Saja Latar Belakang Terjadinya Perkawinana Anak di Wilayah Kecamatan Prambon Nganjuk.
2. Untuk Mengetahui, Menjelaskan dan Menganalisis Bagaimana Penerapan Pembatasan Usia Menikah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dilakukan Oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Prambon Nganjuk dalam Upaya Pencegahan Praktik Perkawinan Anak.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki nilai manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Setiap yang ada pasti bermanfaat, termasuk penelitian ini. Adapun manfaat yang peneliti harapkan, yaitu sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Manfaat Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian hukum, khususnya di bidang hukum keluarga dan perlindungan anak, serta menjadi referensi tambahan bagi penelitian selanjutnya yang membahas tentang implementasi kebijakan hukum dalam masyarakat, terutama terkait pencegahan perkawinan anak melalui regulasi usia menikah.

2. Secara praktis:

a. Bagi KUA Kecamatan Prambon

Sebagai masukan dalam memperkuat peran KUA dalam menjalankan fungsi edukatif, preventif, dan administratif dalam mencegah terjadinya perkawinan anak di wilayah kerjanya.

b. Bagi masyarakat

Meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menikah pada usia yang matang serta dampak negatif dari perkawinan anak terhadap jangka panjang anak-anak.

c. Bagi penulis

Hasil akhir dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman untuk peneliti mengenai pembatasan usia menikah pada anak. Serta sebagai rujukan awal untuk mengembangkan

penelitian serupa di lokasi atau konteks yang berbeda, dengan fokus pada efektivitas pelaksanaan hukum dan perlindungan anak.

E. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu yang dilakukan pada tahap penyusunan skripsi penelitian ini untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti melalui penelitian terdahulu sebelumnya, supaya tidak terdapat pengulangan materi dan isi yang akan diteliti. Adapun penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Skripsi, yang ditulis oleh Musdhalifah dengan judul "*Batasan Usia Perkawinan dalam Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Studi Analisis Praktik Terhadap Pernikahan Dibawah Umur Masyarakat Kampung Nelayan di Desa Saletreng Kabupaten Situbindo)*". Dalam penelitian tersebut, ditemukan dua hasil penelitian yakni: (1) pembatasan usia perkawinan dalam UU perkawinan dan KHI belum berlaku secara optimal sebab praktik pernikahan dini masih kerap terjadi yang disebabkan oleh kultur kelompok masyarakat nelayan yang membutuhkan anggota keluarga sebagai pendukung dalam melakukan pekerjaan; dan (2) pembatasan usia perkawinan menyebabkan terjadinya manipulasi data yang belum bisa diselesaikan oleh penegak hukum di wilayah tersebut.⁶ Terdapat dua persamaan antara penelitian di atas dengan penelitian ini yakni mengenai objek penelitian berupa pembatasan usia perkawinan dan penggunaan teori efektivitas

⁶ Musdhalifah Musdhalifah, "*Batasan Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI): Studi Analisis Praktik Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur Masyarakat Kampung Nelayan Di Desa Saletreng Kabupaten Situbondo*" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2013), h. 137-139.

hukum sebagai dasar teori untuk mendapatkan hasil penelitian. Adapun perbedaannya terletak pada jenis penelitian, jenis penelitian di atas merupakan *field research* sedangkan jenis penelitian ini yaitu *library research*. Selain itu, perbedaan juga terletak pada dasar hukum yang dijadikan rujukan penelitian, penelitian di atas merujuk pada pembatasan usia perkawinan yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974, sedangkan penelitian ini merujuk pada pembatasan usia perkawinan yang diatur dalam UU No. 16 Tahun 2019.

2. Skripsi yang ditulis oleh Yusuf dengan judul “*Dinamika Batasan Usia Perkawinan di Indonesia: Kajian Psikologi dan Hukum Islam*”. Penelitian tersebut menemukan hasil penelitian sebagai berikut: (1) Hukum Islam tidak menetapkan minimal usia bagi calon mempelai yang akan melaksanakan perkawinann, namun para fuqoha’ memiliki perbedaan pendapat dalam menentukan usia kedewasaan seseorang tetapi memiliki tujuan yang sama yakni menegakkan tujuan hukum Islam; (2) Para ahli psikologi berpendapat bahwa usia dewasa yang tepat dalam melakukan perkawinan, yaitu 21 tahun dan seterusnya; (3) Akibat perkawinan yang prematur akan timbul masalah hukum, masalah biologis, masalah psikologis, masalah sosial, dan masalah seksual menyimpang.⁷ Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian yakni sama-sama meneliti batas usia perkawinan dengan jenis penelitian library

⁷ usuf Yusuf, “Dinamika Batasan Usia Perkawinan Di Indonesia: Kajian Psikologi Dan Hukum Islam,” JIL: Journal of Islamic Law1, no. 2 (2020): h. 200

research. Sedangkan perbedaannya terletak pada penggunaan dasar hukum UU Perkawinan.

3. Skripsi yang ditulis oleh Nabila Saifin Nuha Nurul Haq dengan judul “*Batas Usia Minimal dalam Perkawinan Perspektif maqàshid al-syari’ah (Analisis Terhadap Program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan)*”.

Dalam penelitian tersebut, ditemukan hasil penelitian sebagai berikut:

(1) BKKBN menetapkan usia perkawinan yang berbeda dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan berbagai alasan meliputi aspek kesehatan, pendidikan, ekonomi, psikologis, serta kependudukan; dan (2) Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) menurut maqàshid al-syari’ah berhubungan dengan *hifdzu nasl*, namun aspek *hifdz diin*, *hifdz nafs*, *hifdz ‘aql*, dan *hifdz maal* juga memiliki keterkaitan dalam memberikan kemaslahatan dalam penetapan pembatasan usia perkawinan tersebut.⁸ Adapun persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada penggunaan teori *maqàshid al-syari’ah* sebagai *grand theory*, jenis penelitian *library research*, serta analisis aspek kemaslahatan yang teliti dalam pembatasan usia perkawinan. Sedangkan perbedaan mendasarnya terletak pada sumber pembatasan usia perkawinan yang diteliti, penelitian di atas merujuk pada program Pendewasaan Usia Perkawinan yang ditetapkan oleh BKKBN sedangkan penelitian ini merujuk Putusan MK No.

⁸ Nurul Haq and Nabila Saifin Nuha, “*Batas Usia Minimal Dalam Perkawinan Perspektif Maqasid Al-Shari’ah*” (Tesis UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018), h. 7

22/PUU-XV/2017 yang kemudian ditindak lanjuti melalui UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

4. Skripsi yang ditulis oleh Fajar Mohamad Irwan, "*Implementasi KUA Kota Kediri Terhadap Perubahan Penetapan Batas Usia Perkawinan Dalam UU No. 16 Tahun 2019, IAIN KEDIRI.*"⁹ Fajar meneliti secara langsung bagaimana KUA Kota Kediri mengaplikasikan batas usia baru (19 tahun) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019. Temuan menunjukkan bahwa KUA telah melakukan penyesuaian dalam prosedur administrasi, namun implementasi masih kurang efektif akibat minimnya pemahaman masyarakat terhadap hukum dan banyaknya permohonan dispensasi. Persamaan dari kedua peneliti ini Sama-sama meneliti implementasi Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 dan untuk perbedaannya terletak pada lokasi penelitian.
5. Skripsi yang ditulis Muhammad Sahall Nur Hidayah, "*Implementasi Batas Usia Minimal Menikah dalam UU 16 Tahun 2019,*"¹⁰ Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2022." meneliti tren permohonan dispensasi di Pengadilan Agama Bantul yang mencapai ratusan per tahun. Ditemukan bahwa alasan dominan adalah hamil di luar nikah dan tekanan keluarga. KUA telah menjalankan regulasi, tetapi efeknya terbatas. Persamaan kedua penelitian ini sama-sama Memberikan data primer tentang penerapan hukum di tingkat lapangan.

⁹ Fajar Mohamad Irwan, "*Implementasi KUA Kota Kediri Terhadap Perubahan Penetapan Batas Usia Perkawinan Dalam UU No. 16 Tahun 2019, IAIN KEDIRI.*"

¹⁰ Muhammad Sahall Nur Hidayah, "*Implementasi Batas Usia Minimal Menikah dalam UU 16 Tahun 2019, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2022*"

Sedangkan perbedaannya adalah pada strategi pencegahan konkret di KUA Prambon dan rekomendasi kebijakan lokal.